

Universitas Padjadjaran - Bandung

Perkembangan Pembiayaan Pembangunan dan Sumber-Sumber Pembiayaan
Pembangunan di Propinsi Dati I Jawa Barat
(Growth of Development Expenditures and Sources of Development
Expenses in the Provincial Level I District of West Java)

Decentralization Workshop II
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization
(Lokakarya Kedua Untuk Meningkatkan Kesanggupan Universitas
Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI DATI I JAWA BARAT

1. Pendahuluan

Penelusuran perkembangan anggaran pembangunan pada suatu daerah selain dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan juga dapat menjelaskan tentang seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi segala jenis kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, atau juga dapat digunakan untuk menjelaskan seberapa kuat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunannya tiap tahun

Pada bagian ini akan dicoba dijelaskan tentang perkembangan APBD yang telah dilaksanakan di Propinsi Dati I Jawa Barat, sekaligus perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) serta perkembangan bantuan pemerintah pusat terhadap Propinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 1994/1995 hingga tahun anggaran 1997/1998.

2. Perkembangan APBD Propinsi Jawa Barat

Berdasarkan data nilai APBD yang terealisasi di Jawa Barat selama tahun anggaran 1994/1995 hingga 1997/1998 terlihat bahwa secara nominal nilai APBD Jawa Barat dari sisi penerimaan terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 1.325.289.853.525,94 pada tahun anggaran 1994/1995 hingga mencapai Rp. 1.628.926.262.780,99 pada tahun anggaran 1997/1998 (Tabel 1) atau terjadi peningkatan sebesar 81,36%

Besarnya potensi sumber-sumber tersebut saat ini ternyata masih didukung dengan kemampuan sesungguhnya dari unsur-unsur pajak dan retribusi itu sendiri. Hal ini dapat diperlihatkan dari angka *index of tax gap* yang dimiliki oleh Propinsi Dati I Jabar, yang menunjukkan potensi perpajakan yang belum terealisasi atau belum tereksplorasi. Berdasarkan perhitungan *Index of tax gap* yang dilakukan oleh Armida Alisjahbana untuk Propinsi Dati I Jawa Barat pada tahun 1990/1991 terlihat bahwa angka index tersebut menunjukkan nilai positif sebesar 25,5% (Armida Alisjahbana, 1996) yang berarti masih terjadi kesenjangan perpajakan yang dikarenakan rasio antara nilai realisasi dengan nilai prediksi lebih kecil dari 1. Oleh sebab itu kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari sisi pajak masih cukup terbuka lebar.

Sedangkan dari sisi perhitungan "upaya pajak" (*tax effort*) yang dihitung dengan menggunakan ukuran rasio antara PADS dengan PDRB didapatkan nilai untuk Propinsi Jawa Barat untuk tahun 1995/1996 sebesar 0,63% dan menjadi sebesar 0,83 % pada tahun 1996/1997 (meningkat sebesar 31,56%). Nilai upaya pajak sebesar itu mempunyai arti bahwa kemampuan Propinsi Dati I Jawa Barat untuk menarik pajak masih terbuka, karena menurut Nick Devas, perbandingan antara PADS dan PDRB yang telah menunjukkan kemampuan untuk membayar pajak adalah sekitar 2% (Devas, 1988). Berdasarkan kedua perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini potensi peningkatan pendapatan asli daerah sendiri, baik yang berasal dari pajak maupun retribusi, di Propinsi Dati I Jawa Barat masih cukup potensial dan diantara berbagai unsur PADS yang memiliki potensi dan prospektif dimasa yang akan datang adalah sumber-sumber pendapatan seperti :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar dan Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- e. Uang Leges
- f. Retribusi Pelelangan Ikan
- g. Retribusi Bahan Galian Golongan C
- h. Retribusi Ijin Trayek, serta
- i. Retribusi Pengelolaan Pengambilan Air Bawah Tanah, Air Permukaan dan Pembuangan Limbah

4. Perkembangan Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat

Pos sumbangan dan bantuan pada APBD I menunjukkan arus dana yang diterima oleh pemerintah daerah propinsi dari pemerintah pusat. Adapun unsur-unsur yang ada pada pos sumbangan diantaranya adalah :

- Dana bantuan berupa ganjaran kepada propinsi (ganjaran Dati I),
- Subsidi perimbangan keuangan dari negara (Gaji),
- Dana subsidi bantuan pembiayaan penyelenggaraan sekolah dasar (SBPP-SDN),
- Subsidi bantuan biaya operasional rumah sakit umum daerah (SBBO-RSUD),
- Subsidi bantuan pengembangan dan pemeliharaan objek pariwisata daerah (SBPP-OPD)
- Tunjangan kurang penghasilan aparatur pemerintahan desa
- Subsidi bantuan pengembangan usaha penambangan daerah (SBP-UPD)
- Pra- Jabatan, dan
- Subsidi Bantuan Operasional Penyuluhan pertanian

Sedangkan untuk pos bantuan, sumbangan terbesar pada pos ini biasanya berasal dari dana bantuan pembangunan daerah tingkat I yang biasa dialokasikan sebagai dana Inpres Tingkat I serta bantuan peningkatan jalan dan jembatan.

Besarnya peranan dana yang berasal dari pusat bagi pembangunan di Propinsi Dati I Jawa barat dapat ditunjukkan dengan besarnya proporsi pos bantuan dan sumbangan terhadap komponen penerimaan APBD Jawa Barat. Berdasarkan tabel 8 terlihat bahwa proporsi pos bantuan dan sumbangan selalu mencapai angka di atas 55% dari total penerimaan APBD, bahkan proporsinya awalnya mencapai angka 65% pada tahun anggaran 1994/1995, yang kemudian terus menurun, semetara itu perkembangan pendapatan yang berasal dari PADS selama periode yang bersangkutan cenderung mengalami kenaikan - terutama sejak tahun anggaran 1995/1996 ke tahun anggaran 1996/1997 . Besarnya sumbangan dari pos sumbangan dan bantuan ini menunjukkan bahwa sampai saat ini sumber pembiayaan pembangunan di daerah tingkat I Jawa Barat masih sangat bertumpu pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Tabel 8.
Perkembangan Proporsi Tiap-tiap Unsur Pendapatan APBD
Propinsi Dati I Jawa Barat
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (%)

No	P E N D A P A T A N	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997 / 1998
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu	5,83	7,55	4,47	1,47
2	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	26,37	24,87	30,66	39,52
3	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	2,79	2,29	2,94	3,75
4	Sumbangan dan Bantuan	65,01	65,28	61,93	55,26
5	Penerimaan Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Pendapatan	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : APBD, diolah kembali

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi yang lebih luas pada daerah maka kondisi pendanaan bagi pembangunan yang masih sangat bergantung pada sumber-sumber pemerintah pusat menjadi sesuatu yang harus dihindarkan. Oleh karenanya mulai saat ini pemerintah daerah

propinsi perlu mempertimbangkan sumber-sumber dana pembangunan lain yang berasal dari wilayahnya sendiri, seperti yang telah dijelaskan dari pada bagian sebelumnya.

Jika kita lihat komposisi pos sumbangan dan bantuan yang ada terdapat pada APBD Jawa Barat, dana terbesar yang diterima oleh pos tersebut berasal dari dana sumbangan yaitu dana sumbangan pemerintah pusat. Alokasi dana sumbangan ini mencapai proporsi lebih dari 90% dari pos bantuan dan sumbangan, bahkan pada tahun anggaran 1995/1996 pernah mencapai angka 95,41% - dan kemudian mempunyai kecenderungan yang semakin menurun. Data pada tabel 3.9. yang menggambarkan perkembangan nilai dana sumbangan dan bantuan pemerintah pusat terhadap Propinsi Jawa Barat beserta proporsinya.

Tabel 9.
Perkembangan nilai dan Proporsi Dana Sumbangan dan
Bantuan Pemerintah Pusat
Terhadap APBD Propinsi Dati I Jawa Barat
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998

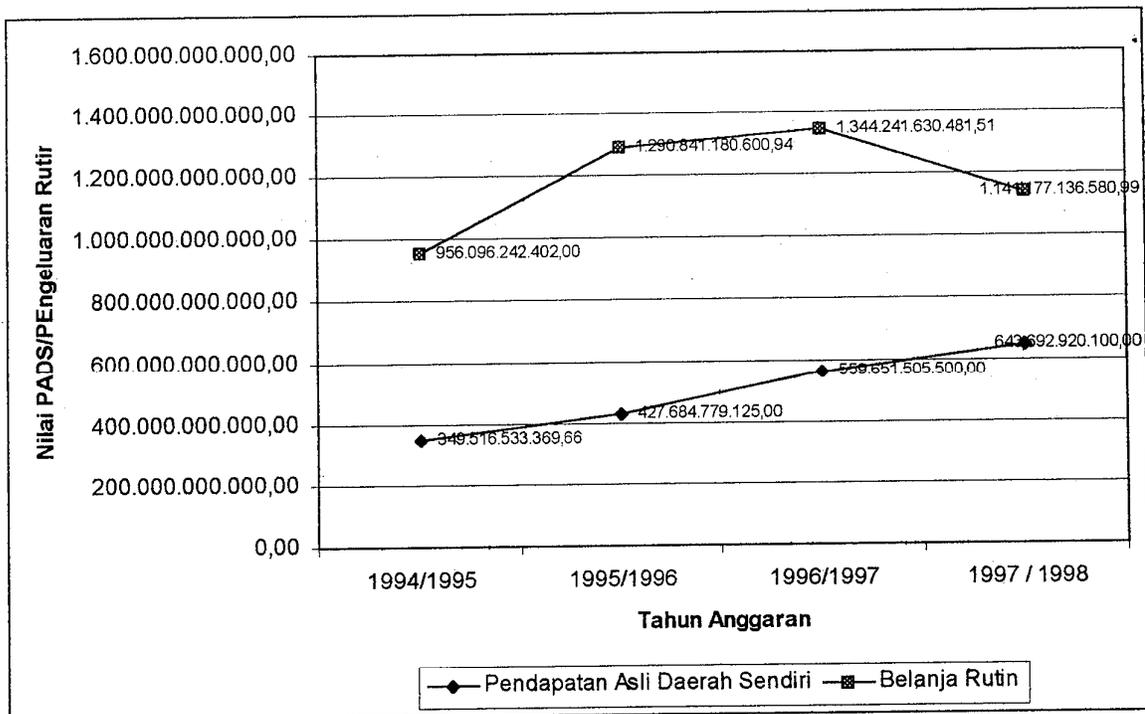
Sumbangan dan Bantuan	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997 / 1998
a. Sumbangan	815.439.261.496,00	1.071.116.393.000,00	1.072.355.401.000,00	825.576.962.764,00
b. Bantuan	46.108.403445,00	51.476.920.000,00	58.016.300.000,00	74.563.185.000,00
Total	861.574.664.941,00	1.122.593.313.000,00	1.130.371.701.000,00	900.140.147.764,00
Proporsi	1994/1995 (%)	1995/1996 (%)	1996/1997 (%)	1997 / 1998 (%)
a. Sumbangan	94,65	95,41	94,87	91,72
b. Bantuan	5,35	4,59	5,13	8,82
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : APBD, diolah kembali

Sedemikian besarnya peranan dana bantuan dan sumbangan tersebut sebagai sumber pendanaan pembangunan Jawa Barat dapat dilihat dari angka rasio antara PADS dengan Pos Pengeluaran Rutin, yang dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah

untuk membiayai anggaran rutinnya sendiri. Berdasarkan gambar 2. terlihat kesenjangan antara PADS dengan Pos Pengeluaran Rutin, hal ini berarti bahwa Propinsi Jawa Barat sampai saat ini ternyata belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutinnya, sehingga dana pembangunan yang selama ini dipergunakan untuk mengembangkan Propinsi Jawa Barat hampir seluruhnya berasal dari pemerintah pusat. Akan tetapi ada satu hal yang optimis dari gambar 2. tersebut adalah terlihat bahwa gap/kesenjangan yang diukur dari jarak kedua kurva tersebut semakin lama semakin mengecil, yang berarti bahwa Pendapatan Daerah Sendiri (PADS) Jawa Barat semakin lama semakin mendekati kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rutinnya sendiri. Kondisi ini merupakan suatu harapan besar dalam masa desentralisasi dimasa yang akan datang karena kondisi ini bisa menunjukkan bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh maka daerah dimasa yang akan datang akan mampu membiayai sendiri kebutuhannya, tanpa ketergantungan yang tinggi dari pemerintah pusat.

Gambar 2.
Perkembangan Nilai PADS dan Pengeluaran Rutin
Propinsi Dati I Jawa Barat
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (Rupiah)



5. Penutup

Berdasarkan hasil pemaparan diatas kita dapat melihat kondisi kemampuan pemerintah Dati I Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunannya. Meskipun hingga saat ini pemerintah Jawa Barat belum mampu melepaskan ketergantungan pembiayaan pembangunannya terhadap pemerintah pusat, akan tetapi tindakan-tindakan untuk memperbesar sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut telah terlihat cukup mengembirakan – terbukti dengan mulai terlihatnya perubahan struktur pembiayaan pembangunan di Jawa Barat (Tabel 4.b).

Tindakan-tindakan untuk terus meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dari lingkungan daerah sekitar Jawa Barat ini kiranya akan tetap berlanjut, mengingat potensi kearah sana masih cukup besar – yang ditandai dengan masih memungkinkannya memperkecil nilai *Index of tax gap* serta memperbesar *tax effort* di Propinsi Jawa Barat. Harapan dari kebijakan pemerintah pusat yang mendorong proses desentralisasi fiskal di daerah tampaknya akan semakin mendorong Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk lebih meningkatkan dan megkonsentrasikan diri menuju kemandirian fiskal yang di inginkan oleh pemerintah pusat tersebut.

selama empat tahun, dengan kata lain bahwa APBD Jabar mencapai angka hampir 2 kali lipat hanya dalam selang waktu 4 tahun anggaran.

Tabel 1.
Perkembangan Nilai APBD Jawa Barat
Tahun 1994/1995 – 1997/1998

No	APBD	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997 / 1998
P E N D A P A T A N					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu	77.245.436.483,40	129.915.501.039,94	81.546.985.422,51	23.988.194.916,99
2	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	349.516.533.369,66	427.684.779.125,00	559.651.505.500,00	643.692.920.100,00
3	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	36.980.218.731,88	39.457.180.000,00	53.605.000.000,00	61.105.000.000,00
4	Sumbangan dan Bantuan	861.547.664.941,00	1.122.593.313.000,00	1.130.371.701.000,00	900.140.147.764,00
5	Penerimaan Pembangunan	-	-	-	-
	Total Pendapatan	1.325.289.853.525,94	1.719.650.773.164,94	1.825.175.191.922,51	1.628.926.262.780,99
B E L A N J A					
1	Belanja Rutin	956.096.242.402,00	1.290.841.180.600,94	1.344.241.630.481,51	1.141.177.136.580,99
2	Belanja Pembangunan	239.278.110.084,00	428.809.592.564,00	480.933.561.441,00	487.749.126.200,00

Sumber : Bappeda, diolah kembali

Berdasarkan data seperti yang ada pada tabel 1. tersebut maka akan dapat diketahui bahwa APBD yang berasal dari sumber pendapatan rata-rata mampu tumbuh diatas 7,12% tiap tahun. Angka pertumbuhan seperti itu merupakan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, dan seharusnya mampu menggerakkan pembangunan di Propinsi Jawa Barat untuk tumbuh dengan pesat

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan data perkembangan APBD kita dapat melihat tingkat perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka dari data sisi belanja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat selama periode tersebut terlihat bahwa ternyata peningkatan penyediaan dana pembangunan (yang didapat dari pos pendapatan) lebih banyak dialokasikan untuk peningkatan belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan. Meskipun begitu proporsi belanja pembangunan –

berdasarkan data 4 tahun tersebut – menunjukkan suatu kenaikan , meskipun tidak terlalu besar (tabel 2.).

Tabel 2.
Kenaikan Proporsi Belanja Pembangunan
APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (%)

Tahun Anggaran	Proporsi Belanja Rutin	Proporsi Belanja Pembangunan	Kenaikan Proporsi Belanja Pembangunan
1994/1995	79,98	20,02	
1995/1996	75,06	24,94	4,92
1996/1997	73,65	26,35	1,41
1997 / 1998	70,06	29,94	3,59

Sumber : Nota Keuangan , diolah kembali

Terjadinya kenaikan proporsi pada pos belanja pembangunan selama periode tahun anggaran 1994/1995 hingga 1997/1998 mengindikasikan bahwa kenaikan pada pos pendapatan dapat digunakan bagi peningkatan pos belanja pembangunan atau dengan kata lain bahwa ketersediaan dana pembangunan di Propinsi Dati I Jawa Barat telah mulai meningkat yang ditunjukkan dengan meningkatnya dana investasi pemerintah. Peningkatan penggunaan ketersediaan dana untuk kepentingan pembangunan ini terlihat jelas dari penurunan pada pos belanja pegawai dari tahun 1996/1997 ke tahun 1997/1998 dimana pos belanja pegawai menurun sebesar 22,92% dari sebesar Rp. 1.073.878.936.000 menjadi sebesar Rp. 827.793.440.564,00.

Terjadinya peningkatan secara nominal pada pos belanja pembangunan yang disertai dengan tingginya laju pertumbuhannya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan pos belanja rutin (Tabel 3.) ditambah dengan terjadinya kenaikan proposi belanja pembangunan menunjukkan semakin jelas bahwa selama periode tahun anggaran 1994/1995 hingga 1997/1998 penekanan penambahan ketersediaan dana pembangunan telah diprioritaskan bagi kepentingan pembangunan dalam arti luas, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Kondisi inipun

diperjelas karena kenaikan ketersediaan dana pada periode tersebut proporsi penambahan pada pos sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat sudah dapat dikurangi dilain pihak proporsi dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) mulai meningkat. Berdasarkan kondisi ini kita dapat mengartikan bahwa alokasi dana pembangunan di Jawa Barat sedikit demi sedikit telah dapat dipenuhi dari kemampuan daerah sendiri, meskipun dalam kuantitas yang masih relatif kecil akan tetapi telah ada semangat untuk kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan.

Tabel 3.
Laju Pertumbuhan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998

Tahun Anggaran	Laju Pertumbuhan Belanja Rutin (%)	Laju Pertumbuhan Belanja Pembangunan (%)
1994/1995 - 1995/1996	35,01	79,21
1995/1996 - 1996/1997	4,14	12,16
1996/1997 - 1997/1998	-15,10	1,42

Sumber : Nota Keuangan , diolah kembali

3. Perkembangan PADS Propinsi Jawa Barat

Besarnya Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dapat menunjukkan kemampuan daerah yang sebenarnya untuk mengumpulkan dana, yang bersumber dari daerahnya sendiri, bagi pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya. Adapun yang menjadi sumber utama dari PADS adalah; pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, bagian laba yang mampu dihasilkan oleh perusahaan daerah (PD) atau badan usaha milik daerah (BUMD), penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) untuk Propinsi Dati I Jawa Barat selama empat tahun terakhir, sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga tahun anggaran 1997/1998, menunjukkan nilai yang terus meningkat (Tabel 4.a). Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa selama empat tahun tersebut kenaikan PADS telah mencapai 84,17% dari hanya sebesar Rp. 349,52 milyar pada tahun anggaran 1994/1995 menjadi sebesar Rp. 643,69 Milyar pada tahun anggaran 1997/1998, atau dengan kata lain pertumbuhan rata-rata PADS yang mampu dicapai selama periode tersebut adalah sebesar 22,58%.

Sejalan dengannya peningkatan penerimaan PADS Propinsi Jawa Barat, dari informasi yang ada tergambarakan juga adanya kenaikan share yang cukup berarti dari PADS terhadap total pendapatan daerah. Bahkan data pada tabel 4.b menunjukkan mulai adanya transformasi struktur pembiayaan di Daerah Tingkat I Jawa Barat – yang ditandai dengan menurunnya share dari pos penerimaan pembangunan dari pemerintah pusat yang disertai dengan meningkatnya share PADS terhadap total pendapatan. Kondisi data pada tabel 4.b tersebut setidaknya sudah menjadi petunjuk awal dari keinginan Jawa Barat untuk melepaskan ketergantungan pembiayaannya pada pemerintah pusat.

Tabel 4.a.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)
Propinsi Dati I Jawa Barat
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (Rupiah)

No.	PADS	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998
1	Pajak Daerah	303.930.725.855,00	384.400.000.000,00	497.873.200.000,00	567.925.000.000,00
2	Retribusi Daerah	33.672.813.232,53	34.104.488.000,00	4.862.599.000,00	65.501.970.000,00
3	Bagian Laba BUMD	4.412.389.239,22	4.440.386.000,00	7.085.513.500,00	6.407.156.100,00
4	Penerimaan dari Dinas-Dinas	279.704.273,50	356.516.090,00	475.845.000,00	688.289.000,00
5	Penerimaan Lain-lain	7.220.900.769,41	4.383.389.035,00	5.591.348.000,00	3.170.505.000,00
	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	349.516.533.369,66	427.684.779.125,00	515.888.505.500,00	643.692.920.100,00

Sumber : APBD, diolah kembali

Tabel 4.b.
Share Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)
Dan Penerimaan Pembangunan Terhadap Total Pendapatan
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (%)

No.	Item	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997 / 1998
1	Share PADS	26,37283704	24,8704438	30,66289242	39,51639401
2	Share Penerimaan Pembangunan	65,00824425	65,28030752	61,93223018	55,25972343
3.	Share lainnya	8,618918715	9,849248678	7,404877407	5,223882558

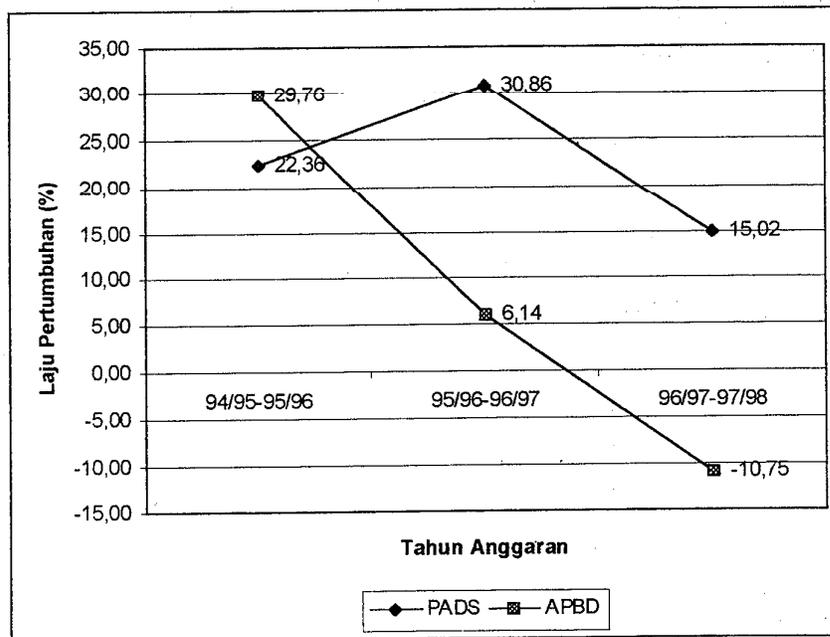
Sumber : APBD, diolah kembali

Laju pertumbuhan rata-rata PADS sebesar 22,58% pertahun selama periode tersebut ternyata hampir menyamai laju pertumbuhan rata-rata APBD-nya (sebesar 22,8%). Hal ini dapat dijadikan petunjuk awal bahwa PADS ternyata telah mampu menjadi salah satu sumber utama dari dana pembangunan Propinsi Dati I Jawa Barat, selain dana utama yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu Hal ini harus menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk terus berusaha lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditunjukkan untuk mendewasakan daerah agar dapat mengatur dirinya sendiri, melalui asas desentralisasi.

Jika kita bandingkan laju pertumbuhan PADS dengan laju pertumbuhan APBD Propinsi Dati I Jawa Barat untuk setiap tahun anggaran (gambar 1), maka akan didapatkan informasi yang lebih menjelaskan bagaimana pola penerimaan PADS dan APBD di Propinsi Dati I Jawa Barat. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa secara nominal Jawa Barat telah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri dengan kecenderungan perkembangannya yang terus cenderung meningkat hingga periode 1995/1996-1996/1997, sebaliknya pada perkembangan laju pertumbuhan APBD meskipun pada tahun anggaran 1994/1995 – 1995/1996 tumbuh dengan laju yang sangat tinggi

(29,76) akan tetapi ditahun-tahun berikutnya terjadi penurunan pada laju perumbuhannya bahkan hingga mencapai pertumbuhan $-10,75$ pada tahun 1996/1997 – 1997/1998. Dari data pada tabel 1. sebelumnya terlihat bahwa penyebab utama dari terjadinya penurunan pada APBD Jawa Barat selama periode tersebut berasal dari berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat, oleh sebab itu dapat kita katakan meskipun PADS Jawa Barat sudah dapat ditingkatkan akan tetapi selama ini kebergantungan sumber modal dari pemerintah pusat bagi pelaksanaan pembangunan masih tetap besar, terbukti jika dana sumbangan dan bantuan pemerintah pusat dikurangi maka akan terjadi penurunan pada laju APBD Propinsi Jawa Barat secara signifikan.

Gambar 1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan PADS dan APBD
Propinsi Dati I Jawa Barat
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (%)



Sumber : APBD, diolah kembali

Apabila kita lihat perkembangan PADS lebih mendalam, dilihat dari unsur-unsur pembentuk PADS, maka akan tergambar bahwa sumber utama dari pendapatan asli daerah sendiri Propinsi Jawa Barat selama periode 1994/1995 – 1997/1998 berasal dari pajak daerah (dengan rata-rata sumbangan sebesar 88,51%) yang dilanjutkan dengan retribusi daerah dengan rata-rata sumbangan sebesar 9,12%. Sumbangan terkecil PADS diberikan oleh penerimaan dari dinas-dinas yang hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,09% saja selama periode tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber utama yang menjadi tumpuan dari penerimaan daerah sendiri Propinsi Dati I Jawa Barat, dengan total sumbangan terhadap PADS rata-rata sebesar 97,63% pertahun, atau dengan kata lain PADS Propinsi Jawa Barat hanya diwakili oleh penerimaan pajak dan retribusi daerah saja. Perkembangan sumbangan tiap-tiap unsur pembentuk PADS di Jawa Barat selama periode 1994/1995 hingga 1997/1998 diperlihatkan pada tabel 5.

Tabel 5.
Perkembangan Sumbangan Tiap-tiap Unsur Pembentuk PADS
Propinsi Dati I Jawa Barat
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (%)

No.	PADS	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	Rata-Rata
1	Pajak Daerah	86,96	89,88	88,96	88,23	88,51
2	Retibusi Daerah	9,63	7,97	8,69	10,18	9,12
3	Bagian Laba BUMD	1,26	1,04	1,27	1,00	1,14
4	Penerimaan dari Dinas-Dinas	0,08	0,08	0,09	0,11	0,09
5	Penerimaan Lain-lain	2,07	1,02	1,00	0,49	1,15
	TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : APBD, diolah kembali

Besarnya sumbangan pajak dan retribusi daerah juga disertai dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata sebesar 23,17%

untuk pajak daerah dan 24,83% untuk retribusi daerah (terlihat bahwa laju pertumbuhan rata-rata retribusi dan pajak daerah melebihi laju pertumbuhan rata-rata dari PADS sendiri, sebesar 22,58%). Berdasarkan tabel 3.6. tersebut terlihat bahwa penerimaan dinas-dinas mempunyai laju pertumbuhan yang cukup besar, bahkan mempunyai laju pertumbuhan rata-rata terbesar yaitu 35,01%, berdasarkan hal tersebut terlihat meskipun dari segi nominal penerimaan dinas-dinas sangat kecil proporsinya terhadap PADS (hanya sebesar 0,09%) akan tetapi ada keinginan dari setiap dinas untuk menyumbangkan hasil kerjanya dalam bentuk penerimaan daerah. Berdasarkan hal ini meski kita sadari bahwa dinas-dinas belum dapat diharapkan untuk menyumbang pendapatan daerah (mengingat bahwa fungsinya sebagai pemberi pelayanan) di tahun-tahun mendatang. Besarnya laju pertumbuhan tiap-tiap unsur pembentuk PADS ditunjukkan oleh tabel 6.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan wewenang otonomi yang lebih besar kepada daerah, serta dengan mempertimbangkan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh propinsi hanya sebesar 10% dari total dana alokasi umum yang akan diterima (UU No. 25/199 pasal 7 ayat 2), maka kedua unsur PADS tersebut – yaitu pajak daerah dan retribusi daerah - menjadi sangat penting, karena pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri.

Tabel 6.
Perkembangan Laju Pertumbuhan
Tiap-tiap Unsur Pembentuk PADS Propinsi Dati I Jawa Barat
Tahun Anggaran 1994/1995 – 1997/1998 (%)

No.	PADS	94/95-95/96	95/96-96/97	96/97-97/98	Rata-rata
1	Pajak Daerah	26,48	29,52	14,07	23,17
2	Retibusi Daerah	1,28	-85,74	1.247,06	24,83
3	Bagian Laba BUMD	0,63	59,57	-9,57	13,24
4	Penerimaan dari Dinas-Dinas	27,46	33,47	44,65	35,01
5	Penerimaan Lain-lain	-39,30	27,56	-43,30	-23,99
	Pendapatan Asli Daerah Sendiri	22,36	20,62	24,77	22,58

Sumber : APBD, diolah kembali

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) FE-UNPAD dengan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat mengenai Studi Kelayakan Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang Dinilai Potensial dan Prospektif tergambar bahwa dari berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terus memacu perkembangan PADS Jawa Barat ternyata hanya sebagian kecil saja - terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah - komponen PADS yang memiliki potensi dan prospek perkembangan yang baik di masa yang akan datang. Diantara berbagai komponen yang potensial dan prospektif tersebut diantaranya adalah :

- a. Pos Pajak Daerah, dimana jika dirinci lebih lanjut bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kedua sumber ini menyumbang lebih dari 95% dari total pajak daerah yang berhasil diambil oleh Propinsi Dati I Jawa Barat. Jika dilihat realisasi penerimaan dari kedua pos dalam pajak daerah tersebut menunjukkan nilai yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun anggaran 1994/1995 hingga tahun anggaran 1995/1996 nilai realisasi penerimaan kedua pos ini masing-masing sebesar 108,16% dan 209,25% untuk tahun anggaran 1994/1995 serta